

TESIS
OPTIMALISASI ASET BANGUNAN DAERAH SEBAGAI
UPAYA EFISIENSI DAN PENINGKATKAN
PENDAPATAN DAERAH

(Studi Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin timur)

Diajukan oleh :



DWIAN ABDI DEWANTARA

NIM. 2120215310028

PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2023

**OPTIMALISASI ASET BANGUNAN DAERAH SEBAGAI UPAYA
EFISIENSI DAN PENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh :
DWIAN ABDI DEWANTARA
NIM. 2120215310028**

**PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2023**

Judul Tesis : Optimalisasi Aset Bangunan Daerah Sebagai Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

Nama : Dwian Abdi Dewantara

NIM : 2120215310028

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 19610621 19900 1 001**



**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19831201 200604 1 002**

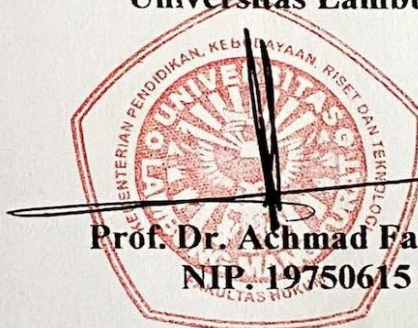
Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



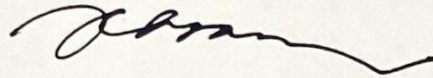
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

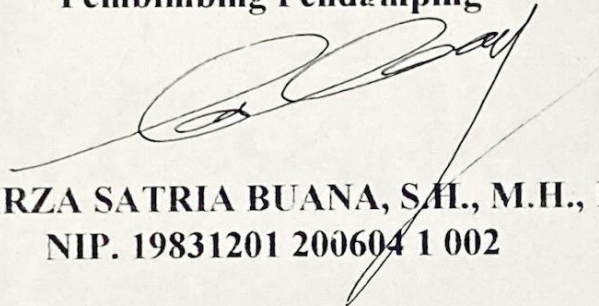
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing utama



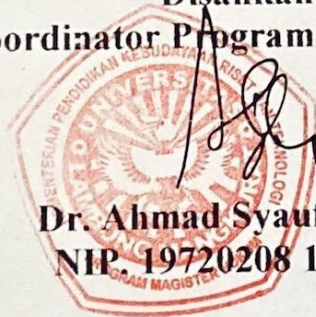
**Dr. H. ICHSAN ANWARY, S.H., M.H.
NIP. 19610621 19900 1 001**

Pembimbing Pendamping



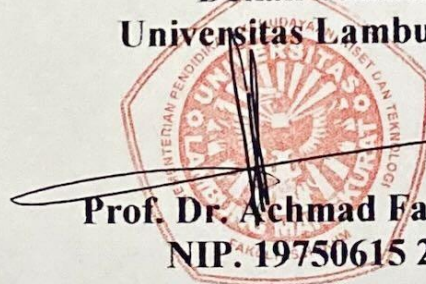
**Prof. MIRZA SATRIA BUANA, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19831201 200604 1 002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal., S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis ini Telah Dinilai dan Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

: 2. Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H.

: 3. Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

SURAT PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DWIAN ABDI DEWANTARA

NIM : 2120215310028

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akedemik di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 19 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



DWIAN ABDI DEWANTARA
NIM. 2120215310028

DEWANTARA, DWIAN ABDI. 2023. OPTIMALISASI ASET BANGUNAN DAERAH SEBAGAI UPAYA EFISIENSI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH. Program Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

RINGKASAN TESIS

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 Ayat 3 berbunyi “Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Barang Milik Daerah (BMD) harus dikelola secara efisien, agar segala sesuatu dalam pemerintahan bisa optimal. Efisiensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya); mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat; berdaya guna; bertepatan guna; sangkil”. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (spending well). Efisiensi penggunaan anggaran harus mencapai target yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait pengelolaan barang milik daerah yang harus dilakukan secara efisien agar optimal, maka penulis disini melihat ada sedikit kejanggalan terhadap pengelolaan yang ada pada Dinas Pemuda Dan Olahraga (DISPORA) di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang mana menurut penulis aset tersebut seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, akan tetapi menyebabkan pengeluaran anggaran yang kurang efisien. Maka penulis termotivasi untuk membuat tesis dengan judul: “OPTIMALISASI ASET BANGUNAN DAERAH SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN SEKALIGUS UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (*Studi Kasus Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Kotawaringin Timur*)”.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal demikian dijelaskan secara jelas di dalam undang-undang bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kuangan daerah adalah kekayaan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah, keuangan daerah adalah salah satu aspek penting dalam proses penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Keuangan daerah sendiri merujuk pada kekayaan daerah yang dapat dinilai dengan uang atau barang. Agar pembelanjaan uangnya efektif dan efisien, pemerintah perlu melakukan pengelolaan yang optimal yang meliputi perencanaan, pembuatan laporan keuangan, dan pengawasan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang milik daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelola barang milik daerah.

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.

Aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah apabila dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan aset daerah adalah dalam segi pemanfaatan aset sehingga akan memberikan penilaian yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dalam pasal 81 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Serah Guna (BGS)/Bangun Susun Guna (BSG), Kerja Sama Penyedia Inspratur (KSPI).

Kendala yang timbul dalam pengelolaan aset daerah antara lain adalah ketidak tertiban dalam pengelolaan data aset sehingga berimplikasi pada kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset karena tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen aset dari mulai perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring terhadap aset daerah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama bapak Bapak Wim Erka Benong S.sos., M.m., selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, Pak wim telah menyampaikan memang ada beberapa Kendala pada pengelolaan aset gedung dan/atau bangunan serta aset-aset pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pemerintah dan dinas terkait sudah dan sedang berupaya untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut walaupun masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan juga pemerintahan sekarang juga sudah mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan cara membuat aplikasi informasi SIPORAKOTIM, agar lebih mudah kedepannya dan semoga bisa cepat terealisasikan.

DEWANTARA, DWIAN ABDI. 2023. OPTIMALISASI ASET BANGUNAN DAERAH SEBAGAI UPAYA EFISIENSIDAN PENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH.

Program Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Abstrak

Kata Kunci : Optimalisasi Aset, Penggunaan Anggaran, Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 Ayat 3 berbunyi “Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”.

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.

Aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah apabila dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan aset daerah adalah dalam segi pemanfaatan aset sehingga akan memberikan penilaian yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.

Kendala yang timbul dalam pengelolaan aset daerah antara lain adalah ketidak tertiban dalam pengelolaan data aset sehingga berimplikasi pada kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset karena tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen aset dari mulai perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring terhadap aset daerah. Dari hasil wawancara memang ada beberapa Kendala pada pengelolaan aset gedung dan/atau bangunan serta aset-aset pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pemerintah dan dinas terkait sudah dan sedang berupaya untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut walaupun masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan juga pemerintahan sekarang juga sudah mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan cara membuat aplikasi informasi SIPORAKOTIM, agar lebih mudah kedepannya.

DEWANTARA, DWIAN ABDI. 2023. OPTIMALISASI ASET BANGUNAN DAERAH SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH. Masters Of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. and Advisor II : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Abstrak

Keywords: Asset Optimization, Budget Use, Local Revenue

Government Regulation Number 28 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property Property Article 1 Paragraph 3 reads “Property Manager is an official who is authorized and responsible for establishing policies and guidelines and managing State/Regional Property Property”.

Referring to the background and focus of the research taken, this research is categorized as empirical legal research. Empirical legal research or sociological legal research is legal research that obtains data from primary data sources.

Regional assets have a very large contribution to the implementation of regional autonomy if they can be managed optimally. One form of optimizing regional asset management is in terms of asset utilization so that it will provide a large assessment of the increase in Regional Original Income (PAD) to support the implementation of regional autonomy.

Obstacles that arise in the management of regional assets include disorder in managing asset data which has implications for a lack of optimizing the utilization and management of assets because a benefit value is not obtained that is balanced with the potential intrinsic value contained in the asset itself. Therefore an asset management system is needed starting from planning, utilization, evaluation and monitoring of regional assets. From the results of the interviews, there are indeed several obstacles to the management of building assets and/or buildings as well as assets at the East Kotawaringin Regency Youth and Sports Service, as well as the government and related agencies have and are trying to optimize these assets even though there are still many difficulties faced, and also the current government has also kept up with the times, namely by making the SIPORAKOTIM information application, so that it will be easier in the future.

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN TESIS DAN GELAR AKADEMIK INI DENGAN NIAT
UNTUK MEMBAHAGIAKAN KEDUA ORANG TUA SEBAGAI PERWUJUDAN
PENGABDIANKU KEPADA ALLAH SWT.

UNTUK ORANG – ORANG TERCINTA:

KEDUA ORANG TUA PENELITI,

MAHMUD DAN DAHRIANI ATAS DUKUNGAN MORAL DAN MATERIL,
SERTA ATAS SEGALA DOA YANG TIADA HENTI TERUCAP, KASIH SAYANG
SERTA DUKUNGAN YANG TAK TERNILAI, TELAH DIBERIKAN KEPADA PENELITI.

GURU, DOSEN, KELUARGA, CALON ISTRI, SENIOR DAN TEMAN-TEMAN
ATAS DOA MOTIVASI DAN SEMANGAT YANG DIBERIKAN KEPADA PENELITI.
PENULIS UCAPKAN TERIMAKASIH YANG SEBESAR- BESARNYA ATAS SELURUH
DOA DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN SELAMA INI.

**“MUTIARA AKAN TETAP MENJADI MUTIARA WALAUPUN BERADA DIDALAM
TEMPAT SAMPAH, TETAPI JADILAH MUTIARA YANG LEBIH BERSINAR DAN
BERKILAU DIANTARA TUMPUKAN MUTIARA”**

-ABAH GURU ARISWANDI RAHMAN-

Man Ana Laulakum

Siapakah diriku, siapakah diriku kalau tiada bimbingan kalian (guru)

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan sebuah karya berupa Tesis dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister hukum ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik sehingga penulis bisa merasakan nikmat Islam sekarang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-2 Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul **“OPTIMALISASI ASET BANGUNAN DAERAH SEBAGAI UPAYA EFIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH”**. Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Tesis ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepatutnya pula dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Abah, Mama, Kaka dan abang. H. Mahmud S.Pd., M.M., Dahriani, Astri Rahmawati S.Pd, M.Pd., dan Bagus Budi Cahyono S.Pd. yang tidak pernah lepas memberikan doa, dukungan dan

semangat yang selalu diberikan kepada penulis. keluarga, penulis tidak akan pernah berada di tempat sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas segala apa yang telah Abah dan Mama berikan kepada penulis. Penulis tak akan sanggup membalas jasa-jasa mereka selama ini, semoga gelar ini bisa membawa keberkahan dalam keluarga penulis;

2. Yang terhormat Bapak Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H. dan Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan Ilmu Pengetahuan, saran dan arahan dalam membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum dan Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;
4. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penulisan Tesis ini;
5. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini;
7. Sahabat dan teman-teman Penulis terimakasih atas bantuan, pemikiran kritikan yang membangun, saran, dan motivasi serta doa yang kalian berikan. Terutama kepada calon Istri

Ayu Widiya, S.M. dan kerabat advokat yang berada di Banjarmasin terimakasih atas doa-doa dan bantuannya.

8. Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2021 yang mena telah sama-sama berjuang dari semester satu sampai akhir.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua. Akhirnya besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan penulis agar Tesis ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juni 2023
Hormat Penulis,

Dwian Abdi Dewantara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
2. RUMUSAN MASALAH	6
3. KEASLIAN PENELITIAN.....	7
4. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELETIAN.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
I. KERANGKA TEORI	12
A. Otonomi Daerah	12
B. Keuangan Daerah	20
C. Aset Daerah/Barang Milik Daerah	24
D. Pengelolaan Barang Milik Daerah	31
II. KERANGKA KONSEPTUAL.....	36
A. Kepala Daerah	36
B. Dinas Pemerintah Daerah.....	39
C. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	56
A. Kontribusi Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah	56
B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pengelolaan Aset Daerah	82
C. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur.....	85

D. Cara Pemerintah Daerah Untuk Mengoptimalkan Aset Yang Ada Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Di Kabupaten Kotawaringin Timur.....	87
BAB V PENETUP	98
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan barang Milik Daerah. (n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara . (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (n.d.).

Buku

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Andi, R. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Bisri, C. H. (2004). *Model Penelitian Fiqih Jilid I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dinas Pemerintah Daerah. (2022, Juni 9). Retrieved from Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_daerah
- Doli, S. (2004). *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia pustaka.
- Doli, S. (2016). *Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta: Sima.
- gadjong, a. a. (2007). *pemerintahan daerah kajian politik dan hukum*. bogor: ghalia indonesia.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi sektor Publik-akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hoesada, J., & Ling, M. (n.d.). *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Kusdarini, E. (2011). *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press.
- mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Makarso, M. T. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marbun, S. (2013). *Hukum Administrasi negara II*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Martosoewignjo, R. S. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian KUALITAF*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- ND, M. F., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasaribu, C. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidin, U. (2015). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- siagian, s. p. (2007). *administrasi pembangunan; konsep dimensi dan strateginya*. jakarta: bumi aksara.
- Sijarudin. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press.
- Soejono, & Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerepan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujana, N., & Kusuma, A. (2000). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru.
- Sukardi. (2005). *Metodelogi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

sumaryadi, i. n. (2005). *efektifitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. jakarta: citra utama.

Sunggono, B. (2012). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supriatna, T. (1992). *Sistem Administrasi Pemerintah Di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

widjaja, H. (2005). *penyelenggaraan otonomi di indonesia*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* . Jakarta: Rajawali.

Yusuf, M. (2013). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Selemba Empat.

Jurnal

(n.d.). *jurnal dinas pemerintah daerah*.

Justisia, F. (2014). ISSN 1978-5186. *Jurnal Ilmu Hukum* 8, 24.

Nuryamin, S. (2016). Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. *Jurnal Hukum*, 7.

Internet

keuangan daerah : pengertian, dasar hukum, prinsip & sumber. (2023, mei 3). Retrieved

from OCBC NISP with you:

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/05/04/keuangan-daerah->

